

ANALISIS PENGARUH JUMLAH INDUSTRI DAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2016

Rio Dwi Heriansyah¹⁾, Ida Nuraini²⁾, Hendra Kusuma³⁾

Abstract: Title: "Analysis of the Influence of the Number of Industry and Human Development Index on the Number of Poor People in the Regency / City of Banten Province 2012-2016". The purpose of this research is to analyze poverty as well as to analyze the influence of industry variable and human development index on the number of poor people in Banten regency / city. The analysis tool used is panel data regression analysis. Based on the analysis of the number of poor people in Banten province still shows a high poverty rate. From the results of the study it can be explained that the variable number of industries has a negative and significant effect on poverty with an F-statistic value of 13.24154 and T-statistics of 3.354906, and the human development index variables have a positive and significant effect on the number of poor people with F- statistics of 13.24154 and T-statistics of 5.040772.

Keywords: index of human ,industry, poor.

Abstrak:Judul: "Analisis Pengaruh Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2016". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemiskinan serta menganalisis pengaruh variabel jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Banten. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis jumlah penduduk miskin di provinsi Banten masih menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai F-statistik sebesar 13,24154 dan T-statistik sebesar 3,354906, serta variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan nilai F-statistik sebesar 13,24154 dan T-statistik sebesar 5,040772.

Kata Kunci : indeks pembangunan manusia, industri, kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Kaluge, 2017), beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan IPM yang masih kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Ningrum, 2017), masalah kemiskinan sudah sejak lama dialami oleh bangsa Indonesia, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda menghilang(Sri & Suliswanto, 2010).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari

¹ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [riodwiheriansyah81@gmail.com]

² [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [Idanuraini@umm.ac.id]

³ [Universitas Muhammadiyah Malang_Malang] Email: [Hendraksm9@gmail.com]

standar hidup tertentu. Menurut (World bank, 2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (*pengangguran*), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Indonesia telah memulai babak baru dalam kehidupan bermasyarakat sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (Aris Soelistyo, 2004), babak tersebut yaitu adalah adanya pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan permasalahan tersebut maka penting dibangunnya sebuah model pemberdayaan dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan atau pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang semakin lebih baik dan terus menerus menuju arah tujuan yaitu Indonesia yang maju, sejahtera dan berdaya saing (Arfida, 2005). Negara Indonesia adalah negara yang mengalami proses pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2014). Masalah di negara berkembang adalah terfokus pada diema antara pertumbuhan dan pendapatan (Arifin, 2009). Menurunnya jumlah penduduk miskin adalah indikator keberhasilan pembangunan, instrumen pembangunan adalah sangat efektivitas untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Kesimpulan dari hal ini adalah kriteria utama untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi adalah dengan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Provinsi Banten masih dalam rata-rata jumlah kemiskinan yang tinggi, hal ini bisa jadi karena adanya faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu faktor jumlah industri dan indeks pembangunan manusia (IPM). Jumlah industri dapat kita lihat dari jumlah perusahaan industri sedang, menengah dan kecil dalam suatu wilayah. Meningkatnya jumlah industri membuktikan bahwa pemerintah mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas dan berakibat pada berkurangnya penghasilan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, kualitas sumber daya dapat kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Indonesia adalah bertujuan untuk menekan kemiskinan. Bagi penduduk miskin pendidikan bukan menjadi aset utama karena mereka bekerja menggunakan

tenaga, namun berbeda jika fasilitas pendidikan dan kesehatan itu murah sehingga aka sangat membantu meningkatkan produktifitas dan pendapatan.

Penelitian oleh (Yacoub, 2012) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Dengan hasil pola hubungan yang tidak searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, dengan jumlah pengangguran yang ada sebanyak 47,86% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan tamat SLTA ke atas (pengangguran terdidik). Untuk variabel tingkat pengangguran adalah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian oleh (Whisnu Adhi Saputra, 2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian oleh (Siregar & Wahyuni, 2007) yang berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin” . tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dampak serta pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia, hal ini karena meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat dari krisis yang belum dapat tertangani. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah namun adalah efek ke bawah (*tickle down effect*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen (X) yang digunakan yaitu jumlah industri, pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel jumlah industri serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang sama sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk

membandingkan hasil penelitian, kemudian diharapkan dengan adanya kesamaan variabel dapat membantu mendukung hasil dari penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama) bagaimana perkembangan jumlah industri, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten, kemudian yang kedua) berapa besar jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dan bagaimana pengaruh jumlah industri dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Banten.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga kemudian di publikasikan ke masyarakat luas. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin. Menurut definisi BPS (2016) jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemudian untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan industri (X_1) dan indeks pembangunan manusia (X_2).

Jumlah industri mencakup semua perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar atau barang setengah jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Definisi dari BPS bahwa industri terbagai menjadi empat yaitu industri rumah tangga atau mikro, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Industri rumah tangga atau mikro adalah usaha atau perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang, industri kecil adalah usaha atau perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan industri sedang adalah usaha atau perusahaan dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang, dan industri besar adalah usaha atau perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 100 orang atau lebih.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- Indeks Harapan Hidup
- Indeks Pendidikan

- Indeks Standart Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

Sumber:(Bappenas, 2018)

Di mana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel yaitu meliputi uji hipotesis yaitu uji f, uji t, dan uji R^2 , sedangkan untuk pemilihan model terbaik menggunakan uji hausman, uji chow, dan uji LM, dan pengujian tersebut menggunakan aplikasi *Eviews*.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, antara lain : Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dakomentasi adalah metode pengambilan data dari lembaga-lembaga terkait, yaitu BPS Provinsi Banten. Pustaka lain yang digunakan sebagai pelengkap yaitu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah ketimpangan wilayah.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan memburuknya perekonomian nasional pada umumnya dan juga perekonomian regional pada khususnya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Perekonomian berangsur membaik, akan tetapi masalah kemiskinan masih merupakan masalah utama yang belum terselesaikan, karena masih tingginya jumlah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Pertumbuhan industri di suatu daerah berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, namun pertumbuhan industri yang cepat bukan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Industri mencakup segala kegiatan produksi yang memproses pembuatan bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun barang jadi atau kegiatan yang bisa mengubah keadaan barang dari suatu tingkat tertentu ke tingkat yang lain, kearah peningkatan nilai atau daya guna yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perkerjasama industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau secara kimia bahan-bahan organis sehingga menjadi hasil baru.

Tabel 1

Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	12	11	13	10	11
Kab Lebak	17	18	20	19	23
Kab Tangerang	682	675	782	740	757
Kab Serang	144	152	148	159	184
Kota Tangerang	555	561	559	641	638
Kota Cilegon	77	77	81	73	79
Kota Serang	21	19	22	19	25
Kota Tangerang Selatan	62	57	57	59	145

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2018)

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berbeda-beda dan rata-rata mengalami kenaikan pada kurun waktu 2012 sampai 2016. Hal ini menunjukkan semakin pesatnya pertumbuhan industri besar dan sedang di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan memberikan kepadatan industri pada setiap daerah di Provinsi Banten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan

dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Tabel 2
Indeks Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012-2016 (%)

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	60.48	61.35	62.06	62.72	63.4
Kab Lebak	60.22	61.13	61.64	62.03	62.78
Kab Tangerang	68.83	69.28	69.57	70.05	70.44
Kab Serang	62.97	63.57	63.97	64.61	65.12
Kota Tangerang	74.57	75.04	75.87	76.08	76.81
Kota Cilegon	70.07	70.99	71.57	71.81	72.04
Kota Serang	69.43	69.69	70.26	70.51	71.09
Kota Tangerang Selatan	77.68	78.65	79.17	79.38	80.11

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2018)

Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2012-2016 adalah mengalami kenaikan. Pada kurun waktu lima tahun setiap tahunnya pada setiap daerah mengalami kenaikan angka ipm, yang disebabkan pemerintah daerah Provinsi Banten memberikan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan keterampilan. Pada tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki nilai IPM paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan dengan nilai 80,11 sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu sebesar 62,78.

Tabel 3
Hasil Olah Data Regresi

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
Jumlah Industri (X1)	Coefficient	0,269450	Coefficient	-0,115283	Coefficient	0,222550
	t-statistic	3,354906	t-statistic	-1,259922	t-statistic	1,322436
	Prb.	0,0018	Prb.	0,2174	Prb.	0,1941
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	Coefficient	-6,873831	Coefficient	1,623159	Coefficient	-4,595012
	t-statistic	-5,040772	t-statistic	1,822054	t-statistic	-1,681450
	Prb	.0,0000	Prb.	0,0784	Prb.	0,1011
	R-squared =	0,417168	R-squared =	0,995310	R-squared =	0,077968
	Ad R-squared =	0,385663	Ad R-squared =	0,993903	Ad R-squared =	0,028129
	F-statistic =	13,24154	F-statistic =	707,4370	F-statistic =	1,564387
	Prob(F-stat) =	0,000046	Prob(F-stat) =	0,000000	Prob(F-stat) =	0,222740

signifikan 5%

Sumber : *Eviews 9.0 data diolah (2018)*

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3 maka diperoleh model persamaan berikut:

$$\text{Common Effect: } \text{LogY} = 7,256093 + 0,269450 \text{ LogX}_1 - 6,873831 \text{ LogX}_2 + e$$

$$\text{Fixed Effect: } \text{LogY} = 12,10510 - 0,115283 \text{ LogX}_1 + 1,623159 \text{ LogX}_2 + e$$

$$\text{Random Effect: } \text{LogY} = 8,309888 + 0,222550 \text{ LogX}_1 - 4,595012 \text{ LogX}_2 + e$$

Pemilihan model terbaik yang pertama adalah uji chow, kegunaan uji chow yaitu untuk memilih antara metode OLS (*Common Effect*) tanpa variabel dummy atau metode *Fixed Effect*. Dari hasil perhitungan uji F yakni prob. $0,0000 < 0,05$ taraf signifikansi $\alpha=5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa model *Fixed Effects* merupakan model yang tepat dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah uji hausman, uji hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effects* atau *Random Effects*. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai prob adalah $0,2510 < 0,05$ dengan signifikansi sebesar 5%, yang berarti H_a ditolak dan H_0 diterima dengan keputusan model RE lebih tepat digunakan daripada model FE, hal ini berarti bahwa model Random Effect model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Pengujian terakhir dalam penelitian ini adalah Uji LM, Uji LM digunakan untuk memilih antara OLS (*Common Effect*) tanpa variabel dummy atau *Fixed Effect*. Dari hasil pengujian didapatkan nilai prob sebesar $0,0000 < 0,05$ taraf signifikansi sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima, yang berarti model CE lebih sesuai daripada model FE untuk data ini.

Dari ketiga uji yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam data ini adalah model *Common Effect*.

Uji Hipotesis

Tabel 4
Hasil Uji F

Hipotesis Alternatif	Nilai	Kondisi	Kesimpulan
Variabel Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten tahun 2012-2016	F hitung = 13,24154 > 4,10	F hitung > F tabel = 13,24154 > 4,10	H_a diterima H_0 ditolak

Sumber : *Eviews* 9.0 data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai F statistik lebih besar dari nilai f tabel. Hal ini berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Industri dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan secara simultan.

Tabel 5

Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	t-Tabel	Prob	Signifikan
Jumlah Industri	0,269450	0,080315	3,354906	1,687	0,0018	Signifikan
IPM	-6,873831	1,363646	-5,040772	1,687	0,0000	Signifikan

Sumber : *Eviews* 9.0 data diolah (2018)

Berdasarkan hasil estimasi tabel 5, maka dapat dijelaskan :

Jumlah Industri (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,354906 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0018. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($3,354906 > 1,687$) dan nilai probabilitas 0,0018 pada $\alpha = 5\%(0.05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Industri secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,040772 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($5,040772 > 1,687$) dan nilai probabilitas 0,0000 pada $\alpha = 5\%(0.05)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,417168 atau 41,71% hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari Jumlah Industri (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2) dalam menjelaskan variabel terikat Jumlah Penduduk Miskin (Y) yaitu sebesar 0,417168 atau 41,71% sedangkan sisanya ($1-0,417168 = 0,582832$ atau 58,28%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang secara implisit tercermin pada variabel pengganggu.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Industri Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil analisis uji statistik variabel Jumlah Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Artinya apabila Jumlah Industri naik sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,269450 atau 26,94%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah industri dapat menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian oleh (Rejekiningsih, 2002) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa industri besar dan kecil berkontribusi kecil terhadap PDRB dan menunjukkan hubungan positif dengan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis uji statistik variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Artinya apabila IPM naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 6,873831 atau 68,73%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan IPM dapat menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Hal ini juga didukung penelitian oleh (Whisnu Adhi Saputra, 2011) dengan hasil IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kesimpulan dan Saran

Jumlah Industri di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun jumlah industri pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berbeda-beda dan rata-rata mengalami kenaikan pada kurun waktu 2012 sampai 2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten pada tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif. Namun pada kurun waktu 2015 sampai 2016 kedelapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang disebabkan pemerintah daerah Provinsi Banten menyediakan lebih banyak kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja untuk penduduk pribumi lebih diperbanyak pada perusahaan-perusahaan

Untuk variabel Jumlah Industri hasil dari uji statistik adalah pertumbuhan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Banten dengan nilai F-statistik sebesar 13,24154 dan T-statistik sebesar 3,354906, kemudian untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil dari uji statistik adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dengan nilai F-statistik sebesar 13,24154 dan T-statistik sebesar 5,040772.

Melihat hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah untuk pemerintah Provinsi Banten lebih selektif dalam memberikan izin pada industri baru, diutamakan industri yang lebih padat karya agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan, maka sebaiknya pemerintah Provinsi Banten disarankan untuk meningkatkan IPM dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfida. (2005). POTENSI SUMBER DAYA DAERAH DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TKI.
- Arifin, Z. (2009). Kesenjangan Dan Konverg Ensi Ekonomi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. *Humanity*, IV, 154–164. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile/821/3007>
- Aris Soelistyo. (2004). ANALISIS FLYPAPER EFFECT PAD DAN DAU TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010-2014 Aisyah, 3.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Banten Dalam Angka. Retrieved from <https://banten.bps.go.id/Bappenas>.
- Bappenas. (2018). IPM. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/>
- Kaluge, D. (2017). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 130.
- Ningrum, S. S. (2017). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2).
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Rejekiingsih, T. W. (2002). Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian Di Propinsi Jawa Tengah, 125–136.
- Siregar, H., & Wahyuni, D. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Economics Development*, (pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin), 1–28. https://doi.org/http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3
- Sri, M., & Suliswanto, W. (2010). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA, 8, 358.
- Whisnu Adhi Saputra. (2011). ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB, IPM, PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH.
- World bank. (2004). poor. Retrieved from <https://www.worldbank.org/>
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 8, 176–185.